

Forum Freedom 13, 15 Agustus 2005

Tema: Kewarganegaraan

Nara sumber : Rizal Mallarangeng

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom..

Hamid Basyaib (HB): Anda bertemu lagi dengan saya Hamid Basyaib dalam acara yang sudah ditayangkan beberapa kali, yaitu Forum Freedom. Kerjasama antara Freedom Institute Jakarta dan radio 68h. Forum Freedom ini akan membahas hal-hal yang mendasar dalam isu-isu kebebasan atau isu liberalisme yang juga sedang hangat. Pagi ini tamu kita adalah DR. Rizal Malarangeng, Direktur Eksekutif Freedom Institute. Saya biasa memanggilnya Celi. Selamat pagi Celi.

Rizal Mallarangeng (RM): Selamat pagi.

HB: Kita mau bicara soal kewarganegaraan. Sebelum itu izinkan saya untuk mengulas sedikit agar kita tahu konteksnya. Begini. Pengertian yang paling umum tentang warga negara adalah anggota komunitas politik atau negara, bukan anggota organisasi atau perkumpulan. Tapi ini jelas konteksnya adalah politik dan negara. Dan seseorang itu disebut warga negara pertama-tama karena kesetiaannya, secara hukum dia setia pada pemerintahan negara tersebut. Kemudian sisi lainnya meminta perlindungan kepada negara dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau punya rumah dan punya hak yang cukup maka rumahnya tidak akan digusur. Kalau dia mau dapat kerjaan maka dia boleh dapat kerjaan; kalau dia pemilih maka dia boleh nyoblos, dst. Itulah konsep warga negara. Ada juga pengecualian misalnya orang yang belum cukup umur dianggap bukan warga negara. Di masa lalu, perempuan pun dianggap bukan warga negara sehingga enggak boleh punya hak pilih. Nah saya kira Anda adalah orang tepat untuk menjawab persoalan ini.

Persoalan pertama: Apa sebetulnya yang dimaksud dengan warga Negara? Saya kira Anda bisa memberikan pengertian yang lebih luas.

RM: Baik. Ini persoalan yang menarik dan mendalam. Kalau kita mau menjelaskan dengan gampang, kita harus kembali ke pengertian dasar dari kata istilah itu sendiri:

Warga Negara. Di sini ada kata negara. Negara adalah sebuah unit politik, sebuah unit hukum yang memiliki penduduk, memiliki teritori, dan diakui keberadaannya oleh negara lain. Ada sekelompok orang bilang kita punya negara sendiri, tapi kalau tidak diakui oleh negara-negara lainnya maka dia gagal menjadi negara. Dia tidak bisa mendarat di New York, lalu tiba-tiba berkata, "Saya ini paspor dari Negara A, B, C tapi tidak tercatat di dalam keimigrasian negara tersebut sebagai sebuah negara yang sah.

HB: Misalnya gerakan separatis Aceh?

RM: Ya, misalnya saja orang Aceh bisa berkata bahwa dia adalah sebuah negara. tetapi tidak diakui dunia internasional maka dia enggak begitu saja ke Singapur misalnya pakai paspor Aceh dari Negara Aceh. Orang Singapur bilang, kalau gitu kau ke penjara aja. Tapi kalau kita mau bahas secara sistematis kita kembali dulu ke akar katanya. Jangan ke negaranya dulu, tetapi ke istilahnya dulu. Warga Negara ini kan terjemahan dari istilah bahasa Inggris Citizen. Dia berasal dari kata dasar City, kota. Ini berkaitan dengan kata politik. Politik juga dari kata polis, satu bahasa Yunani dan satu dari bahasa Latin. Tapi intinya memang sama. Pada jaman sebelum lahirnya negara modern, unit politik yang ada adalah kombinasi antara kerajaan, ada yang kota, tetapi karena di Yunani waktu itu disebut Negara kota, merekalah yang pertama-tama mengembangkan sebuah konsep tentang sebuah entitas politik, sebuah kelompok politik yang mempunyai hak tertentu yang terkait dengan demos (istilah dari Yunani) yang wajib dilindungi secara kontraktual.

HB: Kontraktual. Apa artinya?

RM: Kontraktual artinya ada kesepakatan yang eksplisit antara yang menjadi warga dan yang memimpin warga tersebut dalam bentuk misalnya pemerintahan atau kepala pemerintahan. Jadi ini adalah cikal bakal politiknya yang disebut sebagai warga negara dan entitas politiknya. Dalam perkembangan selanjutnya, kota ini kemudian menjadi negara sebagai unit politik karena perkembangan teknologi, industrialisasi, perdagangan, kesadaran orang, perluasan wilayah. Kota yang tadi menjadi unit politik kemudian berubah menjadi nation state. Ini setelah perjanjian Westphalia 1648, nation state menjadi sebuah unit politik yang disepakati oleh raja-raja di Eropa sebagai sebuah unit tertinggi dari loyalitas politik. Jadi bukan kerajaan. Kerajaan pun kalau dia mau bertahan harus diperlakukan sebagai nation-state.

HB: Istilah kontraktual ini bisa menimbulkan salah paham. Yang dimaksud kontrak antara warga negara dan negara itu tentu bukan satu persatu?

RM: Bukan. Anda lahir setelah 17 tahun, boleh memilih; Anda dianggap warga negara kan enggak pernah teken kontrak sama republik. Ini sudah dijamin dalam proses bersama. Kalau negara modern punya konstitusi. Itulah implisit

dianggap sebagai kontrak bersama. Kita kan tidak memilih pribadi per pribadi. Kita lahir; ibu kita orang Indonesia; kita menjadi orang Indonesia bukan karena pilihan yang sadar.

HB: Artinya kalau orang itu tidak membantah atau menyatakan tidak mengakui, berarti dia terikat kontrak?

RM: Betul. Jadi kalau dia misalnya tidak secara sadar berkata, "Saya tidak mengakui warga negara, saya mau pindah saja ke Amerika." Itu bisa. Tetapi kalau Anda tidak menyanggahnya, secara otomatis Anda dianggap warga negara yang karena itu terikat kontrak menyangkut hak dan kewajiban Anda, menyangkut aturan-aturan yang sah yang harus Anda ikuti. Yang tidak bisa adalah kalau di negara ini Anda tiba-tiba bilang, "Ok, saya ini tidak mengakui Indonesia, saya mau tinggal di rumah saya dan saya mau bikin negara sendiri di rumah saya." Itu enggak bisa. Orang akan anggap ya kalau Anda enggak mengganggu orang, selama Anda masih ngomong gitu aja sih enggak ada soal, tetapi begitu Anda (memberikan) implikasi politik, implikasi hukum, misalnya Anda pajakin orang yang masuk ke rumah Anda, itu enggak bisa. Anda perlakukan hukum yang lain. Atau yang saya katakan tadi. Kalau Anda ke mana-mana, di dunia ini kan hanya ada sekitar 200 entitas yang disebut sebagai negara bangsa. Jadi Anda ke mana-mana, ke luar negeri, Anda harus pakai paspor. Enggak bisa Anda tiba mendarat di London atau di Prancis, Anda enggak pakai paspor terus Anda bilang, "Saya ini warga negara dunia, saya ini enggak mau punya negara."

HB: Dunia ini milik Tuhan?

RM: Ya, ini enggak bisa. Jadi anda enggak bisa enggak punya negara. Anda harus memilih punya negara. Jadi intinya adalah bahwa kalau Anda di airport sebuah negara lalu bilang, "Saya ini warga dunia." Paling-paling Anda di penjara, di kantor imigrasi atau ditahan di situ aja. Ini mencerminkan situasi modern. Pertanyaannya adalah apakah sistem seperti ini baik bagi semuanya? Apakah tidak ada alternatif lainnya? Apa yang membuat loyalitas seorang individu itu memang harus begitu buat Negara bangsanya? Kan banyak orang yang rela mati demi sebuah Negara bangsa. Demi sebuah perasaan patriotisme. Kenapa orang ingin mati, bersedia mati atau berkorban demi sebuah negeri, demi sebuah tata hukum, demi sebuah unit politik. Kalau buat anak saya misalnya saya bersedia mati. Tetapi kalau buat negara apakah kita bersedia mati? Ya, kalau buat saya. Tergantung apa soalnya.

HB: Walaupun sebetulnya konsep negara begitu abstrak. Sesuatu yang lain kalau dibedakan dengan hubungan Anda dengan anak Anda?

RM: Itu konkret. Mereka adalah tanggung jawab saya langsung karena saya dan istri sayalah mereka ada di dunia. Jadi ada hubungan biologis, ada pertanggungjawaban moral. Tetapi kepada Negara yang merupakan sebuah

abstraksi, saya loyal pada negara. Artinya saya loyal pada 220-juta warga Negara Indonesia yang sebagian besar saya enggak kenal. Yang saya kenal kan berapa ratus orang saja dari 220-juta ini. Tetapi kita merasa loyal kepada mereka. Kita merasa setia kepada mereka. Kita melakukan kewajiban sebagai warga negara kepada mereka. Kan bukan kepada abstraksi, tetapi kepada manusia yang hidup. Yang kita enggak kenal. Ini uniknya yang disebut perasaan citizenship ini.

HB: Menurut Anda, bagaimana hubungan yang ideal antara warga negara dan pemerintah. Ada banyak perdebatan di seputar ini. Ada orang yang menganggap warga negara itu mestinya dikasih hak yang besar sekali, dan mungkin dalam banyak hal bisa mengorbankan kepentingan orang-orang lain, sesama warga lainnya. Ada yang bilang sebaliknya. Warga negara itu tidak boleh diberi hak terlalu besar. Dia harus tunduk pada kemauan bersama. Jadi formulasi yang ideal hubungan antara warga negara dan negara itu seperti apa?

RM: Yang paling baik adalah di mana pemerintah hanya menjalankan fungsi-fungsi yang esensial. Seperti misalnya menjaga tata keadilan. Karena kan hakim-hakim harus ada yang bayar. Harus ada yang mengaturnya, yaitu negara atau pemerintah. Kalau saya sendiri siapa hakim saya kan susah. Negara harus menata polisi. Karena harus ada yang menjadi pengatur bersama. Kalau ada yang melanggar, ada yang melakukan kejahatan, harus ada yang mengaturnya. Harus ada yang mengatur jaksa. Ini yang esensial. Harus ada yang (mengatur) bangun jembatan atau minimal siapa yang membangun jembatan. Karena kan enggak bisa setiap orang nunjuk kita harus bangun di sana, dst. Jadi ada fungsi-fungsi dasar yang esensial. Kalau itu diurus pemerintah dengan baik, yang lainnya masyarakat saja. Masyarakat akan sangat baik dan dewasa jika semakin sedikit intervensi pemerintah di dalamnya.

Misalnya kita tahu negara totalitarian, pemerintah atau negara mengatur sampai hal-hal yang substansial di dalam keluarga. Di jaman Mao Zedong misalnya orang tua dan anak dipisahkan. Pendidikan anak dipaksakan, ke mana Negara yang mengaturnya. Saya kira sistem ini sudah gagal dan semua orang sudah tahu bahwa itu enggak mungkin lagi diterapkan. Abad 20 pernah mencobanya. Dengan situasi seperti Indonesia sekarang ini memang kelihatan menuju jalan yang baru yang kita sebut sebagai jalan demokratis. Walaupun tidak sepenuhnya. Kita lihat tangan-tangan negara masih terlalu banyak hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kita inginkan adalah bahwa masyarakat ini semakin matang dalam berusaha, bekerja, berorganisasi, sehingga sebenarnya kehadiran pemerintah hanya terasa pada saat dia berurusan dengan hal-hal esensial atau berurusan dengan hal-hal yang membahayakan hidup banyak orang.

HB: Sebelum kita masuk ke tingkatan yang lain, yang pasti lebih menarik yang terkait dengan situasi yang lebih mutakhir di negeri kita, saya mau tanya sedikit lagi tentang kewajiban. Apa kewajiban-kewajiban warga negara terhadap negaranya?

RM: Ada kewajiban-kewajiban formal seperti membayar pajak, mengikuti aturan hukum positif. Ini kan semuanya kewajiban formal yang memang harus kita lakukan. Ekstrimnya pun kalau situasi negara dalam keadaan bahaya, kita secara hukum wajib untuk membelanya. Kalau kita enggak melakukannya kita bisa dihukum. Ini kan kewajiban-kewajiban esensial bagi semua warga negara.

HB: Wajib militer?

RM: Ya, itu terjadi di mana-mana. Kalau negara dalam bahaya dan membutuhkan Anda, Anda harus siap. Itu kan formal. Tetapi secara informal pun, tanpa harus ditulis dalam hukum, banyak sekali warga negara asalkan diberikan alasan yang tepat, sanggup untuk melakukannya tanpa diperintah secara hukum. Ini berhubungan dengan rasa solidaritas. Solidaritas kita kan macam-macam. Ada solidaritas terhadap keluarga, suku, bangsa, tapi ada juga terhadap yang kita sebut sebagai nation state ini, yang sebenarnya mengatasi solidaritas yang sempit-sempit ini. Itulah dalam situasi yang normal seperti itu. Tetapi kadang-kadang dalam situasi tertentu ada keanehan-keanehan di mana solidaritas kesukuan atau keagamaan kemudian menjadi lebih menonjol. Dan kemudian oleh sebagian orang malah justru dianggap sebagai solidaritas primer. Kalau situasi ini terjadi maka ini akan terjadi perkelahian, perseteruan, perpecahan yang keras dalam sebuah negara. Contoh di Poso. Di mana loyalitas sektarian, yang satu Islam dan satu Kristen, sama sekali menghancurkan solidaritas kepada unit yang lebih besar. Orang tidak merasa sebagai Indonesia, tetapi merasa sebagai orang Kristen atau Islam, Bugis atau non-Bugis, asli atau pendatang. Padahal kita tahu bahwa dalam masyarakat yang sehat di jaman seperti sekarang di mana naungan utamanya adalah Negara bangsa, solidaritas primer kita harus ke sana, yang mengatasi perbedaan-perbedaan kita. Solidaritas pada Indonesia memberikan kita persamaan, bukan perbedaan. Bahwa kita berbeda-beda, ya. Ada semboyan yang sangat klasik yang harus kita camkan terus menerus: Bhineka Tunggal Ika.

HB: Itu motto negara kita. Nah itu sebetulnya sudah tepat?

RM: Bukan cuma tepat. Super tepat buat kita. Kita berbeda-beda yes, tapi kita punya persamaan. Kita punya negara yang sama, kita punya cita-cita yang sama bagi kemajuan seluruh bangsa Indonesia. Inilah sebenarnya yang harus mengatasi loyalitas-loyalitas yang bersifat sektarian yang hanya menunjukkan atau mencari perbedaan kita.

HB: Kita, kalau di lihat orang luar kan enggak dianggap orang Bugis atau orang apa, tapi orang Indonesia?

RM: Ya, orang Indonesia. Perbedaan kita adalah fakta. Kita enggak perlu cari-cari lagi. Tanpa kita cari-cari kita sudah berbeda-beda kok. Yang harus kita lakukan adalah mempertebal, mencari apa yang membuat kita sama, yang menjadikan kita sebuah bangsa. Cerita di Ambon belum cukup mengerikan,

cerita di Poso belum cukup mengerikan, tanpa yang disebut sebagai payung besar Indonesia dan solidaritas kebangsaan yang disentuhnya maka kepulauan nusantara ini bukan menjadi zamrud katulistiwa tapi menjadi ceceran-ceceran darah.

HB: Bisa ribuan kasus ya?

RM: Ya. Anda ke Sulawesi Selatan tempat saya, tanpa adanya payung besar Indonesia orang akan bertanya-tanya, "Anda Makasar atau Bugis, Anda Mandar atau Toraja?" Belum lagi kita bilang Islam-Kristen. Dengan adanya Indonesia kita semua menjadi sama. Dalam pengertian bahwa kewarganegaraan kita sama. Loyalitas kita sama. Kita bayar pajak yang sama. Kita setia pada bendera yang sama.

HB: Ini yang luar biasa buat saya: identitas etnis, etno nasionalisme. Etno nasionalisme kok melanda banyak tempat. Misalnya di Balkan, di Afrika..

RM: Etnonasionalisme bergandengan dengan pencarian kembali semangat keagamaan. Ya mungkin orang bilang bahwa ini ada hubungannya dengan gejala globalisasi di mana terjadi percepatan-percepatan perubahan yang sangat signifikan.

HB: Sementara nilai-nilai baru belum bisa ditangkap..

RM: Dan karena cepatnya perubahan, orang mencoba mencari pegangan. Ini proses biasa. Yang tidak biasa adalah apabila yang kemudian disebut etnik, agama menjadi basis politik bagi pertarungan-pertarungan. Dalam kerangka yang seperti kita lihat di Ambon, di Poso sudah memakan waktu yang sangat panjang dan ongkos yang sangat mahal.

HB: Dan tidak ada yang diuntungkan?

RM: Betul. Identitas etnik enggak dapat juga. Identitas agama pun enggak dapat. Jadi apa sebenarnya yang mau dicari? Karena itu sebenarnya dalam momen-momen kemerdekaan, di mana lahirnya sebuah negara bangsa yang diakui oleh dunia, kita harus kembali lagi berpikir tentang keindonesiaan, tentang solidaritas kita sebagai sebuah bangsa. Dengan mengatakan ini, saya tidak ingin mengecilkan arti individu. Bagaimana pun semuanya pada akhirnya individu. Dalam pengertian bahwa warga negara adalah makhluk-makhluk yang bisa merasa dan berpikir bagi dirinya sendiri. Yang saya maksud adalah unit bersama yang memungkinkan individu itu justru semakin bebas. Inilah uniknya negara. Negara adalah konglomerasi terbesar sepanjang sejarah di mana sebuah

entitas politik memayungi begitu banyak orang. Sebelumnya belum pernah terjadi unit politik yang memegang kekuasaan atau otoritas bagi banyak orang dengan daya paksa yang luar biasa. Tapi pada saat yang sama dengan kuatnya (negara) justru individu-individu semakin bebas. Ini sebuah keunikan tersendiri.

HB: Paradoks positif ya?

RM: Ya. Kenapa? Karena negara yang punya kekuatan memaksa ini menjadi negara yang modern, negara yang konstitusional, negara yang bisa dikontrol, negara yang mengalami sirkulasi elite secara demokratis.

HB: Itu yang tidak terjadi pada negara kuno?

RM: Ya. Jadi dia begitu diperangkap atau dipakai oleh sekelompok elit, dia selesai. Elite ini membela kepentingannya dengan menggunakan negara untuk tujuannya. Dulu kerajaan, city state. Sekarang ini dengan negara demokratis maka itu tidak terjadi dan justru dengan itu individu-individu tidak perlu lagi takut dengan semangat etnis, semangat agama yang irrasional, semangat pengelompokan. Karena dia berkata, "Saya punya pelindung terbesar yaitu negara modern, demokratis dan rasional"

HB: Sekarang dalam konteks Indonesia mutakhir kita tahu bukan hanya konflik-konflik etnis yang Anda sebut tadi, tapi yang paling mutakhir kita juga diguncang oleh munculnya semangat pemaksaan atas nama agama, yakni oleh MUI?

RM: Ini sekali lagi membuktikan bahwa kita belum kunjung maju dalam kesadaran bernegara. Belum selesai dan kita melihat bahwa sayangnya para tokoh-tokoh di MUI ini sibuk mencari perbedaan, bukan persamaan kita. Kalau persamaan kita berujung pada negara bangsa. Kita adalah bangsa Indonesia, kita satu bangsa, kita punya solidaritas primer yang sama.

HB: Kalau perbedaan mudah sekali ya?

RM: Kalau perbedaan enggak usah dicari-cari, toh kita sudah berbeda-beda. Yang harus kita bangkitkan adalah semangat kita untuk terus bersama, mencari persamaan. Ini yang harus diupayakan. Apalagi oleh tokoh-tokoh seperti mereka yang di MUI. Mereka harus mengatakan pada masyarakat di tengah situasi pertengkar di Poso, Ambon, dan di mana-mana mereka harus berkata, "Hai umatku, kita adalah satu bangsa yang sama. Kita dilindungi oleh hukum yang sama. Kita setia pada sebuah Negara dan cita-cita yang sama."

HB: Sesuai dengan cita-cita para pendiri negeri ini?

RM: Ya, kalau mereka berkata seperti itu kan mulia sekali. Apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan urusan kita masing-masing. Biarlah mereka yang percaya kepada sebuah cara tertentu, ya kita enggak bisa paksakan. Mereka juga bangsa Indonesia. Kita harus menghargai mereka sama dengan menghargai diri kita sendiri. Kalau sudah begini, MUI jadi ideal. Tetapi sayangnya MUI sekarang belum ideal.

HB: Ini masalahnya. Mereka menggunakan argument-argumen skriptural berdasarkan kitab suci yang ditafsirkan dengan cara-cara tertentu?

RM: Ini bahayanya. Pada ujungnya kalau mereka meneruskan logika skripturalis itu, mereka akan menghadapkan atau mempertentangkan antara negara dan agama. Di sini ujungnya. Loyalitas tertinggi dalam segi bermasyarakat dan berpolitik adalah negara. Bukan agama. Ini harus dijelaskan dulu. Indonesia bukan negara agama dan tidak pernah bisa menjadi negara agama. Kalau ini dirancukan, agama menjadi negara dan sebaliknya negara menjadi agama, ini berbahaya sekali. Karena Indonesia ini Bhineka Tunggal Ika. Ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sini dan kalau itu dipertajam, hancur kita.

HB: Sebetulnya dari segi konstitusi sudah tepat ya?

RM: Ya, sudah tepat. Founding fathers kita M. Hatta, H. Agus Salim, Soekarno, Sjahrir, mereka sudah. Kalau kata-kata Soekarno, menggali kearifan-kearifan masa silam.

HB: Ini menarik sekaligus merisaukan. Di satu sisi konsep kewarganegaraan kita sedikit banyak terganggu khususnya dalam konteks loyalitasnya kepada negara, antara agama dan Negara. Dan dalam konteks Indonesia jadi sangat penting karena mayoritas besar penduduk negeri ini Islam. Dan kalau satu dewan ulamanya mengatakan seperti itu akan menjadi masalah serius?

RM: Ini akan berbahaya juga karena dalam sejarah kita, konflik atau pertentangan antara konsepsi agama dan konsepsi negara sudah lama juga dan pernah memakan darah dan harta yang tidak sedikit. Pemberontakan-pemberontakan yang dilandasi oleh semangat seperti ini pernah terjadi. Sebaliknya intoleransi negara terhadap keberagaman agama pernah terjadi. Ini berbahaya bagi kedua belah pihak. Karena itu tolonglah jangan coba-coba mengorek-ngorek pertentangan pada tataran itu. Karena tataran itu sangat peka, sensitif dan sudah kita alami. Tidak ada gunanya. Tidak membawa

Indonesia pada kemajuan, tidak mendekatkan kita pada Tuhan, dan tidak memperkuat siapa pun.

HB: Tidak ada yang diuntungkan ya?

RM: Ya, dan saya enggak yakin bahwa itu membuat mereka masuk surga.

HB: Di satu pihak kita melihat ada tarikan ke dalam. Padahal kalau kita lihat tren dunia sebetulnya justru warga negara itu makin dileburkan oleh batas-batas negara.

RM: Ini adalah dua gaya: sentrifetal dan sentrifugal. Ini kan gelombang. Kalau Anda lihat gelombang misalnya ketika Anda di kolam renang. Anda buat gelombang itu di kolam renang, dia bisa ke luar dan bisa ke dalam. Dia enggak bisa berhenti satu sama lain. Saya kuatir dua gaya ini, gaya persamaan dan persatuan, pada saat yang sama dunia semakin besar mempersatukan kita dengan teknologi. Pada saat yang sama pula orang mencari unit-unit yang lebih kecil. Ini sebenarnya proses sejarah biasa saja. Artinya tidak harus ada yang terlalu istimewa. Sejauh yang tadi kita tahu takarannya, kita tahu ukurannya, dst. karena kita harus sadar bahwa sekarang ini belum ada alternatif pada negara sebagai sebuah unit politik yang memayungi begitu banyak perbedaan dalam masyarakat. Bukan cuma di Indonesia. Kalau Anda mau percaya Amerika, banyak sekali unit-unitnya. Belum tentu lebih baik dari yang sekarang.

HB: Kalau di Amerika, Hawaii itu betul-betul berbeda dari banyak seginya ya?

RM: Betul. Anda kan enggak bisa bilang yang merdeka itu hanya boleh Hawaii, bagaimana kalau yang lain-lain mau merdeka?

HB: Kalau yang dicari-cari perbedaan-perbedaan, mudah sekali menemukannya ya?

RM: Sebenarnya kalau kita berpikir radikal tentang unit-unit terkecil pada akhirnya anarkis. Kalau Anda pecah lagi satu negara, misalnya Aceh jadi negara Islam, kan enggak bisa berhenti di situ saja. Itu masih bisa dipecah lagi. Pada akhirnya unit politik akan berimpitan dengan keluarga. Jadi setiap rumah tangga adalah negara sendiri.

HB: Karena waktunya sudah habis kita akhiri diskusi kita kali ini.